

Makna Akuntabilitas bagi Para Pimpinan di Pemerintahan: Studi Kasus Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang

Ade Rajaskana^{1*}, Deviani²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia
Korespondensi: rajaskanaade@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the meaning of accountability for the leaders of the Padang City Civil Service Police Unit. This study is a qualitative approach study using a phenomenological research type. This study observes and listens more carefully and in detail to the explanation and understanding of individuals towards their experiences and explores the meaning through exploring the experiences of the subjects being studied. The researchers in this study collected data through interviews with the leaders of the Padang City Civil Service Police Unit. The results of the study stated that the leaders of the Civil Service Police Unit had understood the meaning of accountability which was seen in terms of aporia, testimony, and gift, but after further study the leaders interpreted accountability more in terms of aporia. Research on the meaning of accountability for leaders is still very little. And the researcher conducted the research in the Padang City area, where in this area the research conducted by the researcher is something new. This study has a contribution, namely based on the results of the study, it can pay attention to how the understanding of accountability and its implementation for the leaders of an organization and can be an inspiration for anyone to conduct similar research.

Keywords : *Accountability; Aporia; Gift; Testimony.*

How to cite:

Rajaskana, Ade, & Deviani. (2025). Makna Akuntabilitas Bagi Para Pimpinan di Pemerintahan: Studi Kasus Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 3 (3), 374-386. DOI: <https://doi.org/10.24036/jnka.v3i3.110>

PENDAHULUAN

Konsep Manajemen Publik Baru (NPM) memerlukan pengenalan lebih banyak insentif di organisasi pemerintah dibandingkan dengan perusahaan swasta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Menempatkan lebih banyak penekanan pada pengukuran output subunit dan menjaga akuntabilitas manajer adalah salah satu insentif ini. Manajer dianggap termotivasi untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, organisasi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya.

Akuntabilitas memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pemerintahan, karena merupakan bentuk kewajiban yang harus dilakukan bagi organisasi publik atau pemerintah dimana akuntabilitas digunakan sebagai pertanggungjawaban setelah selesai melaksanakan fungsi dan tugas pemerintahan kepada atasan dalam suatu pemerintahan. Akuntabilitas ini juga

sangat penting bagi masyarakat yang digunakan sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi dalam melaksanakan tugas.

Berdasarkan instruksi Presiden Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan masing-masing instansi. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Akuntabilitas kinerja dapat dilakukan dengan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan instruksi presiden.

Akuntabilitas individu menurut Wardani (2021) menjelaskan bahwa akuntabilitas individu adalah bentuk dari dorongan psikis yang membuat seseorang bertanggung jawab atas semua tindakan dan keputusan yang diambilnya. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga bertindak sebagai pelaku pemberi informasi untuk memenuhi hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar informasinya. Akuntabilitas individu ini juga sangat berperan bagi kelangsungan tugas yang diberikan, dengan adanya akuntabilitas individu membuat pelaku akuntabilitas harus memberikan tanggung jawab terhadap kewajiban yang diberikan.

Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintahan yang belum memberikan pelayanan publik secara baik dan permasalahan korup menuju suatu struktur pemerintahan yang demokratis. Pelaksanaan pemerintah yang akuntabel akan memberikan dukungan dari publik. Adanya kepercayaan masyarakat atas apa yang diselenggarakan, direncanakan dan dilaksanakan oleh program yang berorientasi kepada publik. Di pihak penyelenggara, akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik.

Wicaksono *et.al.* (2015:7) mengemukakan bahwa akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan pengendalian terhadap organisasi publik terhadap landasan dalam memberikan penjelasan kepada berbagai pihak baik internal maupun eksternal yang berkepentingan melakukan penilaian dan evaluasi terhadap tindakan – tindakan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Pemerintahan yang berjalan dengan baik (*good governance*) akan menjadi ketentuan utama agar dapat mewujudkan harapan masyarakat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam upaya itu dibutuhkan pengembangan dan penerapan system akuntabilitas yang tepat, jelas serta dapat dipahami sehingga pemerintahan berlangsung secara baik dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sehubungan dengan hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan sumber daya dalam bentuk penyampaian laporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang bagian dari perangkat daerah dilingkungan Kota Padang yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kota Padang. Salah satu tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja ialah menegakkan peraturan daerah, peraturan walikota dan menyelenggarakan ketentraman serta ketertiban umum. Fenomena yang dapat dilihat yaitu belum optimalnya penegakan peraturan daerah sehingga adanya upaya satuan polisi pamong praja untuk

menjamin dan memastikan peraturan daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya.

Namun dalam pelaksanaan dilapangan masih banyak ditemukan pelanggaran - pelanggaran perda yang dapat mengganggu tatanan kehidupan masyarakat seperti pkl - pkl yang masi berjualan di atas trotoar dan fasilitas umum. Menurut situs media online yakni portal berita info publik mengatakan bahwa penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan pantai Padang berlangsung ricuh dan terjadi aksi penyerangan serta pelemparan oleh oknum PKL terhadap petugas Satpol PP, Jum'at (13/10/2023) Sore. Akibat dari penyerangan itu, mengakibatkan sejumlah personil terkena lemparan batu serta lampu rotari mobil Dalmas Pol PP Padang hancur akibat lemparan batu tersebut.

Kepala bidang Trantibum dan Tranmas Satpol PP Kota Padang, Rozaldi Rosman mengatakan, insiden ini terjadi sekitar pukul 17.45 WIB, disaat petugas sedang melakukan pengawasan dan menertibkan terhadap PKL yang masih berjualan di kawasan bibir pantai Kota Padang. Hal ini sesuai dengan Perda 11 tahun 2005 para PKL dengan tidak dibenarkan untuk berjualan di fasilitas umum secara khusus di bibir pantai. "Namun dalam pengawasan yang dilakukan petugas pada saat tersebut masih didapati adanya pedagang yang di kawasan bibir pantai, Jalan Ujung Belakang Olo, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang itu", ujurnya

Dengan demikian diperlukan tindakan penegakan Perda baik pelanggar per orangan dan organisasi sejak laporan temuan pelanggaran sampai penyelesaian. Kemudian dalam penegakannya belum optimal karena beberapa Perda belum mempunyai sanksi hukum yang tegas dan kebocoran informasi razia yang masih ada. Oleh karena itu, akuntabilitas kinerja para pimpinan Satpol PP Kota Padang perlu di pertanyakan kembali agar terbentuknya masyarakat yang kondusif dan tertib.

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa akuntabilitas/tanggung jawab kinerja pimpinan dan anggota yang bertugas di lingkup Satpol PP perlu ditingkatkan. Oleh sebab itu akuntabilitas salah satu aspek penting yang menarik untuk dikaji.

Penelitian mengenai akuntabilitas masi sedikit, salah satu penelitian yang dilakukan oleh John Francis Mckerny (2012) menyatakan bahwa akuntabilitas bergantung pada tanggung jawab tetapi rendering akuntabilitas cenderung melemahkan tanggung jawab. Dalam upaya untuk memberikan kontribusi positif terhadap pertanyaan tentang bagaimana akuntabilitas dapat berkontribusi untuk meningkatkan tingkat tanggung jawab bagi pihak lain, makalah ini secara kritis membangun perspektif Levinasian yang ada mengenai pertanyaan ini, dan mengembangkan sarannya, yang terinspirasi oleh karya Derrida, bahwa dalam keadaan yang tepat, konfigurasi ulang akuntabilitas sebagai kesaksian dan hadiah dapat membantu meningkatkan tanggung jawab.

Peneliti akan meneliti khususnya mengenai bagaimana cara pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang memaknai akuntabilitas kinerja dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang aparatur. Peneliti memilih Satpol PP dalam penelitian ini karena perspektif negatif di mata masyarakat berkaitan dengan keberadaan Satpol PP, berdasarkan fakta di lapangan banyak oknum aparat Satpol PP bertindak semaunya. Maka sudah menjadi wacana umum ketika orang ditanya tentang Satpol PP yang kerap kali digambarkan sebagai sosok aparat yang kasar dan arogan. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan Satpol PP tidak selamanya buruk, karena keberadaannya sangat dibutuhkan untuk menjalankan peraturan daerah. Artinya keberadaan Satpol PP masih dibutuhkan dalam perspektif pemerintah daerah sebagai eksekusi Perda.

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan hasil observasi diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang permasalahan ini dengan judul "Makna Akuntabilitas bagi Para Pimpinan (Studi Kasus Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang)"

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Akuntabilitas

Konsep akuntabilitas dalam perspektif Jacques Derrida dan Emmanuel Levinas sangat dipengaruhi oleh filsafat etika yang berpusat pada tanggung jawab moral dan relasi antarindividu, yang berbeda dengan pemahaman tradisional tentang akuntabilitas dalam organisasi atau pemerintahan. Kedua pemikir ini mengajukan pandangan yang melampaui sekadar pelaporan atau pengukuran kinerja formal (Jhon Francis McKernanny, 2012). Dalam perspektif Jacques Derrida, teori akuntabilitas tidak seperti pendekatan tradisional yang menekankan transparansi, laporan formal, atau sistem pengawasan. Derrida, seorang filsuf post-strukturalis, menawarkan pandangan yang lebih kompleks melalui konsep akuntabilitas sebagai aporia sebuah keadaan paradoks yang sering kali tidak memiliki solusi yang pasti. Akuntabilitas pada penelitian ini dimaknai menjadi 3 bagian yaitu aporia, testimony dan gift sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh McKernanny (2012).

1. Akuntabilitas sebagai Aporia merujuk pada kebingungan atau dilema, di mana tidak ada solusi mudah dan semua keputusan membawa konsekuensi yang kompleks.
2. Akuntabilitas sebagai Kesaksian (Testimony) menekankan bahwa akuntabilitas bukan hanya sekadar laporan formal, tetapi juga ekspresi kejujuran, kebenaran, dan komitmen terhadap orang lain.
3. Akuntabilitas sebagai Pemberian (Gift) menunjukkan bahwa akuntabilitas juga bisa dilihat sebagai tindakan sukarela, di mana seseorang bertanggung jawab bukan karena kewajiban tetapi karena niat baik dan komitmen moral.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang

Satpol PP ialah aparat Pemerintah Daerah Kota Padang yang melaksanakan tugas dari Walikota Padang untuk memelihara dan menyelenggarakan ketentraman serta ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota Padang. Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Walikota dan Sekretaris daerah.

METODE PENELITIAN

Pemilihan Metode Penelitian

Menurut (Denzin K. N. Lincoln S.Y, 1994) penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan latar belakang alamiah dengan maksud untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan cara melibatkan metode penelitian lainnya. Penelitian ini menggunakan penelitian fenomenologi dengan mendeskripsikan secara cermat dan teliti mengenai makna akuntabilitas bagi pimpinan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penjabaran metode dan langkah-langkah yang dilakukan dengan merincikan secara eksploratif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti memilih menggunakan metode ini dengan bahan pertimbangan bahwa fenomena yang diteliti termasuk fenomena yang membutuhkan penggunaan pengamatan serta observasi lebih dalam dan bukan menggunakan model angka atau statistik.

Objek Penelitian

Objek penelitian ini ditujukan kepada pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang. Peneliti memilih Satpol PP dalam penelitian ini karena perspektif negative di masyarakat berkaitan dengan keberadaan Satpol PP, berdasarkan fakta di lapangan, banyak oknum aparat Satpol PP bertindak semaunya. Maka sudah menjadi wacana umum ketika orang ditanya tentang Satpol PP yang kerap kali digambarkan sebagai sosok aparat yang kasar dan arogan. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan Satpol PP tidak selamanya buruk, karena keberadaannya sangat dibutuhkan untuk menjalankan peraturan daerah. Artinya

keberadaan Satpol PP masih dibutuhkan dalam perspektif pemerintah daerah sebagai eksekusi Perda.

Sumber Data

Pada penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu data primer yang berkaitan dengan fakta atau keterangan dari informasi yang dinyatakan dalam ungkapan dan digunakan untuk sumber rujukan dalam pengambilan keputusan. Pada penelitian ini peneliti memperoleh data primer melalui observasi dan wawancara. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu sekretaris, kepala bidang dan seksi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang dengan waktu 4 Jam 37 Menit. Alasan peneliti mewawancarai 9 informan karena dalam penelitian ini hanya berfokus kepada para pimpinan/kepala yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang. Jawaban dan penjelasan dari informan cukup serupa sehingga membutuhkan peneliti untuk membuat ringkasan hasil penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Dalam melakukan observasi, peneliti mengamati bagaimana pimpinan Satpol PP Kota Padang dalam bekerja. Hasil observasi di dapat peneliti bahwa pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang masi terdapat beberapa kendala seperti dalam pengawasan, adanya aparat yang tidak turun ke lapangan pada saat bertugas, kemudian pada saat di lapangan kebanyakan para pimpinan tidak langsung terjun. Dan juga banyaknya para anggota Satpol PP bersifat arogan dilapangan oleh sebab itu akuntabilitas pimpinan harus di pertanyakan. Pada saat pelaksanaan kegiatan kemampuan SDM memerlukan kompetensi yang baik. Saat peneliti melakukan observasi di lapangan masih ada yang tidak berkompeten dalam bekerja seperti pada saat apel gabungan pada Senin pagi masih ada beberapa para pimpinan yang tidak datang tanpa alasan dan juga ada yang terlambat.

2. Wawancara

Peneliti mendapatkan informasi langsung dengan teknik wawancara dari Pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang yang bersedia diwawancarai berjumlah 9 orang. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah jenis wawancara yang termasuk dalam kategori wawancara mendalam (in-depth interview), yang memberikan lebih banyak kebebasan dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data (informasi) yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar tersebut dapat berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto-foto. Dokemen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini dokumen digunakan sebagai penunjang untuk melengkapi data hasil wawancara.

Keabsahan Data

Data yang telah dikumpulkan nantinya akan diuji dengan menggunakan 4 kriteria untuk menjamin keabsahan datanya :

1. Kredibilitas

Pada tahap kredibilitas data diuji menggunakan teknik triangulasi atau dengan melakukan pemeriksaan kepada keabsahan data yang menggunakan sesuatu diluar data yang ada hubungannya dengan pengecekan atau sebagai bahan pembanding untuk data yang telah didapatkan.

2. Dipendabilitas

Dilakukan untuk menjamin bahwa peneliti telah mendapatkan alat pendukung dari informasi data baik berupa pedoman tertulis, foto ataupun rekaman suara.

3. Transferabilitas

Dilakukan jika semua pihak yang terkait seperti peneliti, pembaca dari hasil penelitian mempunyai pemahaman yang sama terhadap penelitian yang dilakukan.

4. Konfirmabilitas

Pemeriksaan yang dilakukan peneliti pada hasil penelitian agar dapat melihat kesamaan antara penemuan dan data yang telah terkumpul sebagai faktor pendukung dan menjamin semua data yang diperoleh sudah dianggap benar apabila sudah mendapatkan konfirmasi dari informan dan unsur lain yang terlibat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Penelitian

Makna Akuntabilitas bagi Para Pimpinan sebagai Aporia

Para pemimpin yang ditetapkan sebagai informan pada penelitian ini memiliki beberapa jawaban dari pengertian akuntabilitas sesuai karakter masing-masing. Salah satunya pimpinan yang bernama Bapak Indra Jaya, SH, MH sebagai kepala bidang linmas pada Satpol PP, mengungkapkan bahwa akuntabilitas sebagai aporia yaitu :

“Tanggung jawab adalah sebuah kewajiban yang diberikan pimpinan kepada kami untuk mengawasi suatu pekerjaan yang dilakukan oleh anggota Satpol PP.”

“Menurut kami tanggung jawab adalah salah satu hal yang harus digabungkan dengan pekerjaan yaitu bagaimana melakukan pekerjaan dengan baik dan sesuai dengan SOP yang ada, itu yang bertanggung jawab untuk mencari hasil yang lebih baik juga.”

“Tanggung jawab itu adalah amanah, jadi intinya sesuai dengan tupoksi saya adalah sumber daya aparatur tadi memanteh untuk bertanggung jawab ke semua personil yang ada di Satpol PP yang berjumlah untuk kontrak 398 orang.”

”Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas sangat penting karena memastikan tim bekerja untuk tujuan bersama, menanamkan rasa percaya dan saling menghormati.”

Berdasarkan temuan peneliti dilapangan didapatkan beberapa informan telah mengetahui arti dan makna akuntabilitas dalam menjalankan tugas yang diberikan. Dikarenakan para informan merupakan pimpinan pada Satpol PP Kota Padang tentunya telah memiliki banyak pengalaman dalam memimpin para anggotanya serta mempunyai jiwa tanggung jawab yang besar serta amanah dalam bekerja.

“Akuntabilitas itu adalah pertanggung jawaban, berarti apa yang sudah diembankan pada kita, diamanahkan dan dilaksanakan, yang dilaksanakan itu bukan kita sendiri kita bekerja secara tim artinya sebagai seorang yang diamanahkan memiliki jabatan berarti punya tim.”

Para pimpinan harus menegakkan akuntabilitas dalam keseharian bekerjanya. Untuk itu banyaknya kegunaan bagi para pimpinan menjalankan tugas dengan akuntabilitas tersebut. Hal tersebut digunakan baik untuk kelancaran pekerjaan secara pribadi maupun dalam tim.

Tugas dan fungsi pokok seseorang pimpinan selalu berasal dari pimpinan paling tinggi di instansi. Pada Satuan Polisi Pamong Praja pimpinan paling tinggi disebut Kasat atau kepala satuan. Kasat atau kepala satuan bertugas memimpin serta orang pertama yang memberikan

arahan kepada pimpinan struktur di bawahnya, seperti kabid (kepala bidang) dan kasi (kepala seksi) pada Satuan Polisi Pamong Praja tersebut.

Arahan serta tugas yang diperintahkan oleh kasat tersebut harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin bagi struktur di bawahnya, dimana para kabid di arahkan langsung oleh kasat sedangkan para kasi diarahkan langsung oleh kabid. Tentunya arahan tersebut diberikan secara hierarki agar tujuan utama Satpol PP untuk menjaga kesejahteraan dan mengayomi masyarakat dapat ditegakkan.

"Yang meminta saya untuk tanggung jawab yaitu atasan saya langsung yaitu Kasat Pol PP, kalau kita sudah diamanahkan berarti itu sudah bertanggung jawab oleh yang memberikan amanah itu."

"Atasan langsung yaitu kasat pol pp, diatas saya ada dua sekretaris dan kasatpol, jadi intinya yang menugaskan langsung kebawahannya secara administrasi ya sekretaris, tapi secara kebijakan ada di tangan kasat Satpol PP."

"Ya di Satpol PP ini saya memiliki pimpinan diatas saya yaitu bapak kabid dan bapak kasat, merekalah yang memberikan arahan kepada saya."

Melalui hasil wawancara, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pemahaman makna akuntabilitas bagi pimpinan Satpol PP secara aporia telah maksimal, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang ditemukan di lapangan yaitu masa jabatan atau banyaknya pengalaman para pimpinan dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diberikan, serta cara pimpinan menjawab pertanyaan secara dalam tentang makna akuntabilitas bagi dirinya sebagai seorang pimpinan.

Makna Akuntabilitas bagi Para Pimpinan Sebagai Testimoni

Pemaknaan akuntabilitas dilihat dari testimony atau kesaksian mengacu kepada tanggung jawab seorang individu atau pimpinan untuk memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya pada saat menyampaikan kesaksian. Perlu adanya transparansi dalam melakukan tugas dan peran sebagai pemimpin, karena setiap informasi yang didapat oleh pemimpin diberitahu kepada anggota untuk kelancaran tugas di instansi Satpol PP. Berikut hasil wawancara salah satu informan yaitu bapak Rio Ebu Pratama, S.IP, MM :

"Yang pertama yaitu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tugas kita sudah diatur dalam perda dan perwako. Kalau secara regulasi sudah diatur berarti itu tanggung jawab kita. Dibidang saya ini, saya bertanggung jawab terhadap peraturan perundang-undangan daerah yang mana apabila ada yang melanggar seperti tempat usaha coffee shop yang belum memiliki izin akan kita tindak lanjuti."

Adanya kesaksian dari Bapak Rio mengatakan bahwa tugas yang telah ia laksanakan sudah di atur dalam peraturan daerah dan peraturan wali kota. Sebagai kepala bidang P3D (Penegak Peraturan Perundang Undangan Daerah) yang terjun langsung ketika adanya suatu UMKM yang tidak sesuai dengan aturan, menunjukkan bahwa beliau telah melakukan tugasnya dengan akuntabilitas atau dengan tanggung jawab.

"Selain dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang diatur melalui peraturan pegawai negeri sipil, kemudian melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak keluar dari koridor dan ketentuan yang ada di tupoksi itu dan melakukan tugas sebaik mungkin dan semaksimal mungkin dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat di Kota Padang."

Dari jawaban yang telah dilontarkan oleh bapak Indra Jaya, SH, MH diatas mengatakan bahwa hal yang dilakukan bagi kelancaran akuntabilitas yaitu harus sesuai dengan peraturan yang berlaku baik peraturan daerah ataupun peraturan kota. Terbentuknya tanggung jawab seseorang pimpinan juga harus mengikuti ketentuan peraturan pegawai negeri sipil. Informan atau pimpinan lainnya yaitu Bapak Desril Tafria, S.E, M.,AP selaku kepala bidang SDA menjawab bahwa hal yang dilakukan demi terbentuknya akuntabilitas juga berasal dari tanggung jawab mereka dalam memimpin suatu bidang ataupun seksi :

“Dalam menjalankan tugas tadi atau tupoksi tadi, jadi intinya tanggung jawab berbasis sumber daya aparatur tadi jadi nanti kita bertanggung jawab disiplinnya gimana, tingkah lakunya gimana, kejujurannya gimana itu harus, di SDA inilah kancahnya untuk memberikan warna dalam arti apa itu permendagri no 16 tahun 2003 tentang kode etik dan SOP itu kita jalankan secara nasionalnya, dan secara daerahnya adalah di perda 14 tahun 2018 tentang pegawai kontrak dan pegawai non kontrak.”

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Desril tersebut beliau menjelaskan bahwa para aparatur harus mampu memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban atas tindakan mereka sesuai dengan kode etik dan SOP yang telah ditetapkan. Ini berarti mereka harus siap untuk menjelaskan dan memberikan bukti bahwa mereka telah menjalankan tugas dengan disiplin, jujur, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Akuntabilitas sebagai testimony di sini menggarisbawahi perlunya transparansi dan keterbukaan dalam proses pertanggungjawaban, sehingga tindakan dan keputusan dapat dipahami dan diakui oleh pihak lain.

Keterangan yang diberikan dari pimpinan Satpol PP yaitu Bapak Rio Ebu Pratama, S.IP, MM yang menyebutkan berbagai solusi atas kendala yang mereka hadapi, sehingga kendala tersebut dapat diatasi semaksimal mungkin. Adapun wawancaranya sebagai berikut :

“Kalau masalah itu pasti ada, setiap masalah terkait masalah kinerja kita atau di organisasi kita itu pasti ada, tentunya kita harus menyelesaikan itu kalau bisa antisipasi agar tidak ada masalah tapi kemungkinan untuk tidak ada masalah itu sedikit, tapi tentu kita ada upaya untuk meminimalisir langkah-langkah nya itu perlu perencanaan langkah dari awal, kemudian lakukan kegiatan dengan SOP yang ada. Karena walaupun kita sudah bekerja sesuai SOP tidak kemungkinan ada masalah. Kemudian tidak menutup kemungkinan kemampuan SDM kita dalam pelaksanaan kegiatan kita butuh kompetensi dan juga tanggung jawab tadi, kompetensi kalau kamu tidak ada akuntabilitas tidak akan seimbang maupun sebaliknya, kalau ada akuntabilitas tapi tidak ada kompetensi juga tidak akan berhasil. Akuntabilitas punya kompetensi itu adalah hal yang bagus dan seimbang, yang paling penting itu perencanaan kemudian punya kedisiplinan karna sudah diatur di perwako.”

Hasil wawancara tersebut peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pemahaman akuntabilitas bagi pimpinan Satpol PP secara testimoni sudah baik tetapi ada sedikit kekurangan yakni belum ada inisiatif dari para pimpinan untuk melayani masyarakat diluar jam kerja yang mana sesuai dengan pengertian kesaksian yaitu di mana seorang individu atau lembaga secara aktif menanggapi dan mendengarkan kebutuhan orang lain serta bertindak dengan integritas, bukan hanya karena kewajiban hukum yang hanya melayani di jam kerja .

Makna Akuntabilitas bagi Para Pimpinan Sebagai Gift

Ada beberapa yang akan didapatkan bagi siapa saja pada instansi Satpol PP yang melakukan tugas dengan akuntabilitas atau tanggung jawab, seperti akan diberikan berupa uang, pergantian uang BBM bahkan akan diberikan makanan atau minuman untuk menjaga daya tahan tubuh. Hal tersebut tentunya akan semakin menambah peningkatan kinerja bagi seluruh jajaran Satpol PP. Sebagaimana jawaban wawancara dari informan atau pimpinan lainnya yaitu Bapak Bontoro Jontro P, S.T, selaku kepala sub bagian umum Satpol PP, dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti beliau mengatakan :

“Ada beberapa reward atau penghargaan, tapi bukan berupa hadiah, terutama kita mungkin secara tidak langsung ketika mereka telah melaksanakan tugas mungkin salah satu bentuk langsung spontanitas kita memberikan berupa bonus dalam artian bisa uangkah, nanti uang pergantian BBM misalnya atau nanti namanya untuk memberikan minuman atau makanan yang menambah daya tahan tubuh mereka.”

”Ya itu bagus, kalau mereka bekerja secara baik dan bagus akan kita berikan reward atau penghargaan untuk mengapresiasi kinerja mereka dan loyalitas nya terhadap Satpol PP ini.”

Dengan diadakannya reward atau penghargaan ini diharapkan para anggota dapat melaksanakan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab serta sesuai aturan yang berlaku di Satpol PP. Reward atau penghargaan diberikan bagi setiap pimpinan ataupun anggota yang telah memberikan kesan atau kinerja yang baik, dilain sisi jika ada pimpinan maupun anggota yang melakukan kesalahan akan diberi punishment atau hukuman. Jadi reward dan punishment itu sejalan dan beriringan, dan berlaku bagi seluruh orang yang berada pada Satpol PP tersebut. Seperti hasil dari wawancara informan atau pimpinan pada Satpol PP yaitu Bapak Rio Ebu Pratama, S.IP, MM selaku kepala bidang P3D dan Bapak Rozaldi Rosman, S.STP, M.Si selaku kepala bidang tibum berikut :

“Masalah reward atau punishment itu berimbang, reward dan punishment harus diberikan terhadap yang bekerja baik dan yang bekerja buruk, jadi itu sebuah keharusan kemudian itu salah satu motivasi untuk kita semua untuk melaksanakan kerja dengan baik, terlepas adanya reward dan punishment juga, seperti yang saya bilang tadi kalau sudah diberikan tanggung jawab kerjakan. Gaji dan tunjangan itu sudah sebagai pembayar keringat kita, mau diberikan penghargaan atau tidak itu urusan nanti.”

“Untuk namanya satuan kita memiliki reward dan punishment, setiap yang melanggar kita berikan hukuman, setiap yang tertib disiplin dan bagus sesuai kriteria yang ada tentu kita berikan reward, untuk reward kami selaku pimpinan di bidang kami ada memberikan kepada mereka semacam upah tambahan dan secara keseluruhan dari Satpol PP kita berikan reward dan penghargaan serta piagam pada saat momen hari ulang tahun Satpol PP yang di selenggarakan tiap tahun nya.”

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan adanya keseimbangan antara reward (penghargaan) dan punishment (hukuman) dalam menjalankan tugas yang diberikan. Adanya 2 hal tersebut tentunya sangat diperlukan untuk mendorong kinerja yang baik pada Satpol PP. Reward diberikan kepada mereka yang bekerja dengan baik, sementara punishment dikenakan pada mereka yang melanggar aturan. Ini berfungsi sebagai motivasi agar semua anggota tim berusaha melakukan yang terbaik.

”Dalam bekerja tentunya harus dilakukan dengan sepenuh hati, agar pekerjaan pun dapat terselesaikan dengan baik dan benar, begitupun sebaliknya jika bekerja mengharapkan suatu

imbalan maka pekerjaan tersebut akan dilakukan dengan cerobah dan tergesa gesa dan tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal.”

“Ketika kita melaksanakan tugas dengan ikhlas tidak mengharapkan apapun, maka apapun hasil dari pekerjaan tersebut nantinya kita bisa menerima dengan baik, contoh misalnya kita diberikan tugas yang mungkin tidak bisa dikerjakan orang lain tapi bisa kita laksanakan itu merupakan sebuah kepuasan, apalagi itu menyangkut nasib hidup banyak orang.”

Melalui hasil wawancara tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa peran reward atau penghargaan pada instansi Satpol PP Kota Padang sangat memberikan dampak yang positif. Reward yang diberikan bagi siapapun yang telah melakukan tugas sebaik mungkin dengan penuh tanggung jawab. Selain itu adanya reward ini juga memberikan semangat bekerja dan memotivasi diri menjadi lebih baik. Akan tetapi para anggota tidak boleh juga menjadikan reward ini sebagai landasan untuk menjalankan tugas. Mereka harus melakukan tanggung jawab masing-masing dengan sepenuh hati dan ikhlas, sehingga pekerjaan tersebut tidak menjadi beban karena mengharapkan imbal semata saja.

Pembahasan Temuan

Makna Akuntabilitas bagi Para Pimpinan sebagai Aporia

Hasil temuan dapat membuat pembahasan bahwa pada topik akuntabilitas sebagai aporia yang memiliki makna tanggung jawab moral yang tunggal yaitu bagaimana seorang pimpinan mengartikan serta memaknai akuntabilitas itu sebagai landasan menjalankan tanggung jawab, yang rasa tanggung jawab tersebut berasal dari diri sendiri. Makna yang terkandung dalam akuntabilitas sebagai aporia ini dapat membangun jiwa kepemimpinan lebih berintegritas. Pemimpin yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan akuntabilitas merupakan pemimpin yang pahan akan etika ketika melakukan pekerjaan.

Satpol PP menjalankan akuntabilitas sebagai aporia dengan memegang tanggung jawab moral yang mendalam dan berpedoman pada kerahasiaan serta etika publik. Dalam setiap langkah dan tindakan, mulai dari penertiban pedagang kaki lima, hingga penanganan pedagang yang berjualan di trotoar, mereka mempertimbangkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Para pimpinan di Satpol PP menjaga kewajiban moral tanpa batas, tidak hanya dalam penegakan aturan tetapi juga dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

Satpol PP tidak hanya bertindak sebagai penegak kebijakan, namun mereka adalah penjaga nilai-nilai masyarakat yang mengedepankan akuntabilitas penuh, menjamin bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang jujur, etis, dan rahasia demi ketertiban umum. Pimpinan Satpol PP adalah figur yang memiliki integritas dan kredibilitas, mampu menjadi sosok yang dipercaya publik dalam menjaga dan mengatur ruang publik yang tertib serta berkeadilan. Dengan menjalankan akuntabilitas sebagai aporia, Satpol PP menunjukkan bahwa komitmen terhadap kewajiban publik merupakan inti dari keberadaan mereka, menciptakan ketertiban dan ketenangan di tengah masyarakat melalui dedikasi yang penuh tanggung jawab dan pengabdian yang tulus.

Pemimpin yang menegakkan akuntabilitas sebagai aporia melakukannya dengan pendekatan dan cara yang beragam. Perbedaan ini lahir dari interpretasi unik setiap pemimpin terhadap tanggung jawab moral dan etika yang harus mereka pikul. Ada pemimpin yang fokus pada tugas negara dan aturan formal yang melekat pada posisi mereka. Bagi mereka, menjalankan akuntabilitas adalah wujud dari pemenuhan mandat negara dan instrumen hukum yang harus ditaati. Pemimpin ini memegang teguh nilai-nilai yang tertulis dalam aturan, sehingga setiap tindakan yang diambil mencerminkan komitmen mereka pada tugas formal yang telah diberikan. Akuntabilitas bagi mereka merupakan perwujudan dari ketertiban dan keadilan yang bersifat objektif, berdasarkan hukum yang berlaku. Mereka menjaga

kepercayaan masyarakat melalui transparansi dan kepatuhan terhadap aturan, memberikan contoh yang jelas dalam menegakkan hukum.

Di sisi lain, ada pemimpin yang menjadikan akuntabilitas sebagai cara untuk memperdalam peran mereka dan motivasi diri. Bagi mereka, tanggung jawab moral tidak hanya sekedar tugas formal, tetapi adalah bagian dari pengembangan diri sebagai seorang pemimpin. Mereka memandang akuntabilitas sebagai panggilan hati untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat dan menjadi panutan yang menginspirasi. Dengan mendalami peran mereka secara pribadi, pemimpin ini sering kali memadukan aturan yang ada dengan kebijaksanaan pribadi dan intuisi yang lebih halus. Bagi mereka, akuntabilitas adalah sebuah perjalanan terus-menerus untuk memaksimalkan potensi diri, membangun hubungan emosional dengan masyarakat, dan menunjukkan kepedulian serta empati. Pemimpin dengan pendekatan ini mungkin tidak hanya terpaku pada kebijakan tertulis tetapi juga pada nilai-nilai luhur seperti keadilan dan kasih sayang yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Kondisi pengambilan keputusan dan tanggung jawab terhadap suatu hal selalu bersifat tunggal.

Akuntabilitas tingkat individu biasanya disebut dengan moral. Para pimpinan melakukan akuntabilitas dengan cara berani untuk mengambil resiko atas ucapan dan perbuatannya. Adanya akuntabilitas ini akan membuat para pimpinan sadar akan setiap tanggung jawabnya dan menjalankannya dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, seseorang pemimpin yang bermoral harus bertanggung jawab dengan cara yang etis agar bisa memenuhi tugas dan kewajibannya secara mutlak.

Makna Akuntabilitas bagi Para Pimpinan Sebagai Testimoni

Hasil temuan dapat membuat pembahasan bahwa pengaplikasian akuntabilitas sebagai testimoni atau kesaksian para pimpinan telah berjalan dengan baik pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, tetapi ada beberapa hal yang belum menjelaskan bagaimana akuntabilitas sebagai kesaksian menekankan bahwa bukan hanya sekedar laporan formal tetapi juga terkait inisiatif para pimpinan membuka layanan diluar jam kerja kebanyakan para pimpinan bertugas melayani masyarakat hanya di jam kerja. Hal tersebut dibuktikan dari jawaban para pimpinan baik sekretaris, kepala bidang maupun kepala seksi.

Meskipun dihadapi dengan berbagai kendala baik internal ataupun eksternal tidak membuat instansi ini berjalan dengan buruk. Banyaknya cara untuk menanggapi kendala ini, sehingga dapat diatasi. Misalnya saja penertiban pedagang kaki lima atau PKL, peran aktif dari Satpol PP sangatlah dibutuhkan mengingat yang mengetahui kondisi di lapangan adalah Satpol PP sehingga mereka harus bekerja keras dan bertanggung jawab akan tugas penertiban tersebut agar ketertiban, keindahan dan keamanan kota dapat tercapai sesuai harapan. Adapun yang dilakukan dalam pembinaan dan penertipan PKL ini adalah Satpol PP harus : (1) memberikan penyuluhan atau sosialisai, (2) menanamkan kesadaran atau kepatuhan akan aturan, (3) memberikan teguran atau sanksi bagi PKL yang melanggar, (4) melakukan penertipan lokasi PKL yang menempati badan jalan, dan (5) memperlakukan zona/wilayah terhadap PKL agar tidak mengganggu ketertiban.

Oleh karena itu, Satpol PP harus memiliki strategi dalam menghadapi tantangan yang ada, jika kendala berasal dari internal tentunya para pimpinan baik kabid ataupun kasi akan memberikan teguran atau sanksi bagi para anggota yang tidak bekerja dengan SOP yang berlaku sehingga kendala tersebut dapat diatasi dan dioptimalkan. Adanya teguran dan sanksi ini tentu tidak hanya berlaku bagi masyarakat saja, para anggota yang tidak melakukan tanggung jawab atas tugas yang diberikanpun akan mendapatkannya, sehingga bagi yang mendapatkan teguran atau sanksi tersebut mendapatkan efek jera dan tidak mengulangi kesalahannya.

Makna Akuntabilitas bagi Para Pimpinan Sebagai Gift

Hasil temuan di atas, peneliti dapat membuat pembahasan bahwa pada pemahaman makna akuntabilitas dari segi gift atau reward bagi pimpinan sudah cukup baik. Dimana bagi instansi Satpol PP ini sangat banyak peran reward atau penghargaan dan dampaknya bagi setiap pimpinan maupun anggota. Adanya reward atau penghargaan dapat menjadi motivasi dan semangat dalam menjalankan tanggung jawab. Para pimpinan atau anggota yang menghasilkan kinerja yang bagus akan mendapatkan reward ini agar tetap konsisten terhadap tanggung jawabnya.

Reward atau penghargaan juga merupakan sebuah imbalan yang diberikan baik dalam bentuk material dan non material yang diberikan oleh pimpinan Satpol PP kepada jajarannya ataupun para anggota agar mereka dapat bekerja dengan motivasi tinggi dan prestasi dalam mencapai tujuan utama Satpol PP yaitu menjaga ketentraman dan ketertipan. Adapun reward secara materil dapat berupa pemberian bonus, kenaikan gaji, voucher atau hadiah lainnya, sedangkan non materil dapat berupa pemberian gelar, tanda jasa, piagam penghargaan, pujian lisan atau tulisan, hak untuk menggunakan fasilitas perusahaan, perlengkapan khusus di ruangan kerja, ucapan terima kasih, dan lain-lain.

Dengan kata lain pemberian reward atau penghargaan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan penghargaan kepada anggota yang telah bekerja keras menjalankan tanggung jawabnya. Diharapkan bagi pimpinan atau anggota yang mendapatkan reward ini dapat terus berkomitmen serta konsisten dalam tanggung jawab yang telah diamanahkan.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Simpulan penelitian ini mengenai akuntabilitas dilihat dari aporia, testimony, dan gift. Instansi Satpol PP lebih memaknai akuntabilitas sebagai aporia daripada sebagai testimony atau gift. Dalam pendekatan aporia, Satpol PP menekankan pemahaman mendalam akan tugas dan tanggung jawab moral mereka, yang dilandasi oleh etika dan kerahasiaan yang dijaga ketat. Satpol PP tidak sekadar menunjukkan pencapaian sebagai bukti (testimony) atau sekadar memberikan pelayanan sebagai pemberian (gift), tetapi mereka menjalankan tugas dengan kesadaran penuh akan tanggung jawab tanpa batas untuk menjaga ketertiban dan keamanan publik. Dengan demikian, akuntabilitas mereka terwujud melalui komitmen yang tulus dan integritas yang tinggi dalam setiap tindakan.

Keterbatasan

Penelitian ini tidak lepas dari kekurangan dan keterbatasan, dimana penelitian ini hanya memiliki 9 informan yaitu para pimpinan yang terdiri dari sekretaris, kepala bidang dan kepala seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang sehingga kurang luasnya informan yang digunakan. Hal ini disebabkan ada beberapa pimpinan yang sedang tugas keluar kota, mengikuti pelatihan bahkan ada yang enggan bersedia meluangkan waktunya. Seharusnya para informan ini dapat membantu untuk memperdalam dan memperluas informasi yang dibutuhkan.

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan keterbatasan yang ada, peneliti menyarankan bagi penelitian selanjutnya untuk menambah jumlah informan sehingga bisa mendapatkan informasi lebih banyak dan lebih mendalam. Dengan adanya informan yang lebih banyak membuat penelitian selanjutnya dapat mengembangkan pembahasan lebih detail.

DAFTAR PUSTAKA

- Denzin K. N. Lincoln S.Y. (1994). *Hand Book Of Qualitative Research*. New Delhi: Sage Publications.
- McKernan, J. F. (2012). Accountability as aporia, testimony, and gift. *Critical Perspectives on Accounting*, 258-278.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Wardani, Triska Zunia (2021). Pengaruh independensi, akuntabilitas, dan objektivitas terhadap kualitas audit (studi empiris pada auditor internal inspektorat kab. Jombang). Undergraduate thesis, STIE PGRI Dewantara Jombang.
- Wicaksono, Kristian Widya. 2015. "Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik." *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)* 19(1):17. doi: 10.22146/jkap.7523.